

Pidie Jaya Usul Dana Penanganan Covid-19 ke Provinsi Rp 15 Miliar



Bupati Pidie Jaya, H Aiyub Bin Abbas (tiga depan kanan) bersama Wakil Bupati, H Said Mulyadu SE MSi (tengah depan) memimpin rapat koordinasi bersama SKPK terkait pengusulan dana penanganan Covid-19 di ruang kerja bupati setempat, Selasa (4/8/2020).

SERAMBINNEWS.COM, MEUREUDU - Penanganan dampak bencana pandemi Covid-19 yang semakin meningkat selama beberapa bulan terakhir, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pidie Jaya (Pijay) mengusulkan dana penanganan Covid-19 ke Provinsi Aceh sebesar Rp 15 miliar untuk tiga sektor utama. Keputusan pengusulan dana penanganan dampak Covid-19 ini setelah unsur Pemkab setempat menggelar rapat koordinasi di ruang kerja rapat bupati setempat yang langsung dihadiri oleh Bupati H Aiyub Bin Abbas, Wakil Bupati H Said Mulyadi SE MSu, Plt Sekda, Ir Jailani Beuramat, Ketua DPRK A Kadir Jailani, Asisten III, Drs Abubakar Usman, serta delapan Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) terkait.

"Kekuatan usulan dana Rp 15 miliar ini mesti menyahuti pada tiga sektor utama yaitu kesehatan, ketahanan pangan serta pemberdayaan ekonomi masyarakat," sebut Bupati H Aiyub bin Abbas didampingi H Said Mulyadi SE MSi kepada Serambi, Selasa (4/8/2020). Hal ini seiring dengan surat intruksi surat gubernur Aceh, Ir Nova Iriansyah Nomor 44/10816 terhadap percepatan pencairan belanja bantuan keuangan bersifat khusus seiring meningkatnya jumlah kasus Covid-19 di Aceh. Menurut orang nomor satu di Pijay H Aiyub Bin Abbas bahwa usulan dana sebesar Rp 15 miliar itu tertampung dalam kegiatan dinas terkait. Seperti halnya Dinas Kesehatan (Dinkes) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (Distanpang), Dinas Pekerjaan Umum (PU), Dinas Perindustrian, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (Disperdagkop UKM), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Perkebunan dan Peternakan (Disbunnak) serta Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP).

Semua usulan dana penanganan Covid-19 yang diajukan perlu dilakukan rasionalisasi sesuai dengan kebutuhan riil dan skala prioritas dalam menyahuti berbagai kegiatan dalam penguatan demi menghadapi dampak perekonomian terhadap masyarakat di tengah bencana pandemi Covid-19 ini. "Semua usulan dana dari para SKPK ini tertampung dalam Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten Perubahan (APBK-P) 2020 mendatang," ujarnya.(*)

Sumber:

<https://aceh.tribunnews.com/2020/08/04/pidie-jaya-usul-dana-penanganan-covid-19-ke-provinsi-rp-15-miliar>, Selasa, 4 Agustus 2020 13:20.

Catatan :

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.07/2020 tentang Penyaluran dan Penggunaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2020 dalam Rangka Penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19)
 - a. Pasal 3
 - 1) Pemerintah Daerah wajib menganggarkan belanja wajib bidang kesehatan yang besarnya telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dalam APBD dan/atau perubahan APBD.
 - 2) Belanja wajib bidang kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk kegiatan pencegahan dan/atau penanganan Covid-19.